

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

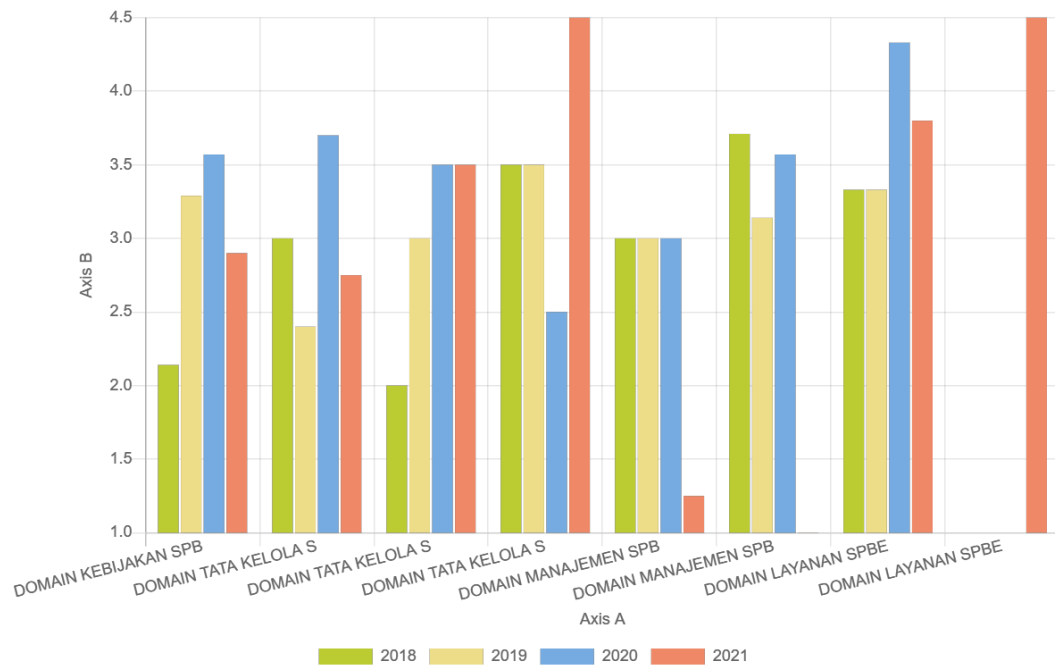
Dalam beberapa tahun ini sudah hampir seluruh aspek kehidupan menggunakan teknologi informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat menjadikan sistem pemerintahan di Indonesia berbondong-bondong untuk memanfaatkan teknologi ini dalam penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan proses administrasi saat ini menjadi skala prioritas yang harus dikembangkan oleh pemerintah. (Bouty et al., 2019) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95 yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah satu alasan pentingnya SPBE adalah dikarenakan perlunya pengelolaan yang transparan dan tuntutan perubahan di era yang semakin berkembang saat ini. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik masyarakat dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (Abrar Muslim et al., 2019)

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam pengimplementasian SPBE diperlukan untuk melakukan evaluasi secara berkala agar dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan publik dan proses kerjanya. (Bouty et al., 2019) Evaluasi SPBE dapat dilakukan dengan mengacu pada indeks predikat SPBE yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdapat pada Tabel I-1.

Tabel I- 1 Nilai Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Berdasarkan Laporan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, hasil nilai dari SPBE Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 menampilkan hasil indeks akhir 3,28 dimana nilai tersebut menunjukkan predikat “Baik”. Akan tetapi, hal ini masih harus ditingkatkan agar dapat mencapai target yang diinginkan. Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE merupakan dua usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks tersebut. Pada gambar grafik yang didapatkan dari laman situs opendata.jabarprov.go.id dijelaskan bahwa terjadi penurunan nilai indeks SPBE di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun.



Gambar I.1 Grafik Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar, 2021)

Gambar I.1 yang menunjukkan grafik indeks SPBE Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan belum tercapainya predikat “Sangat Baik” pada domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE di pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Terdapat satu sistem layanan pemerintahan yang berada di Provinsi Jawa Barat yaitu Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan data berupa dokumen laporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, pada tabel di bawah ini ditemukan adanya hasil evaluasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021 yang

dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB No.18 Tahun 2022 mengenai Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Tabel I- 2 Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat

Tahun		2021
Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat		3.28
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	2.90
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2.90
Domain 2	Tata Kelola SPBE	3.40
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	2.75
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.50
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	4.50
Domain 3	Manajemen SPBE	1.18
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1.25
Aspek 6	Audit TIK	1.00
Domain 4	Layanan SPBE	4.08
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.80
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.50

Sumber: Laporan Kajian Evaluasi Implementasi dan Strategi Optimalisasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2022

Berdasarkan Tabel I-2, diperoleh SPBE di Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai sebesar 3.28 dengan predikat “Baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai SPBE di Provinsi Jawa Barat belum ada di predikat “Sangat Baik”. Lalu, dilihat dari tabel di atas, pada domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan aspek Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih menunjukkan di angka yang cukup rendah yaitu 2.75 dengan predikat “Baik”. Selain itu pada domain Layanan SPBE dengan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik berada di angka 3.80 dengan predikat “Sangat Baik”.

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, dapat diambil keputusan bahwa perlunya meningkatkan nilai SPBE Provinsi Jawa Barat melalui beberapa indikator keberhasilan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, transparan, dan dapat meningkatkan efektivitas serta keefisienan dari suatu layanan publik. Penulis juga akan memberikan rancangan baru proses bisnis pada Bapenda Provinsi Jawa Barat.

Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa bidang di dalamnya. Salah satunya yaitu Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang memiliki 5 sub kegiatan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Diantaranya adalah

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah, pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dan pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban. Dari kelima sub kegiatan tersebut, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang masih memiliki *gap* dalam mencapai realisasi target capaian kinerja rencana strategis. Berdasarkan dari Laporan Rencana Kerja Bapenda Provinsi Jawa Barat 2023 nilai *gap* yang dimiliki ketiga sub kegiatan tersebut adalah 63.57%. Dikarenakan hal tersebut, penulis akan memfokuskan penelitian pada perancangan arsitektur enterprise pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dengan menggunakan TOGAF ADM agar Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dapat mencapai realisasi target kinerja rencana strategis dari Bapenda Provinsi Jawa Barat sehingga dengan tercapainya realisasi target kinerja tersebut akan menaikkan nilai indeks SPBE Provinsi Jawa Barat menjadi “Sangat Baik”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mendapat rumusan masalah pada tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana rancangan arsitektur *enterprise* di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana perancangan *IT Roadmap* pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mendapat tujuan penelitian pada penelitian tugas akhir ini yaitu

1. Untuk menghasilkan rancangan arsitektur *enterprise* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan?
2. Untuk menghasilkan perancangan *IT Roadmap* pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

I.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Perancangan Arsitektur *Enterprise* dengan menggunakan *framework* TOGAF ADM yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB No.18 Tahun 2022 tentang penyusunan arsitektur SPBE dalam lingkup instansi pemerintahan daerah yaitu Bapenda Provinsi Jawa Barat pada fase preliminary, fase architecture vision, arsitektur proses bisnis, arsitektur layanan, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, fase *opportunities and solutions*, serta fase *migration planning*.
2. Perancangan Arsitektur *Enterprise* yang befokus dalam penaikan nilai indeks SPBE Provinsi Jawa Barat agar dapat mencapai indeks “Sangat Baik”.

I.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Dapat memberikan usulan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan melakukan perancangan Arsitektur *Enterprise* guna meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB No.18 Tahun 2022.
2. Dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi penulis kedepannya dalam melakukan perancangan Arsitektur *Enterprise* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.